

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Istilah “anak abah” awalnya merupakan identitas kolektif yang digunakan oleh para pendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01 yaitu Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar selama masa kampanye Pemilihan Umum 2024. Label “anak abah” ini menggambarkan solidaritas politik dan afisiliasi emosional terhadap figur Anies Baswedan yang kerap disapa dengan panggilan “abah” Namun, setelah penetapan Presiden dan Wakil Presiden oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 24 April 2024, istilah atau julukan “anak abah” ini mengalami transformasi makna. Label “anak abah” mulai digunakan secara luas untuk merujuk pada individu atau kelompok yang menyuarakan kritik terhadap kinerja atau kebijakan pemerintah tanpa memperhatikan afiliasi politik sebelumnya.

Transformasi makna ini mencerminkan penggunaan label sebagai alat deligitamsi terhadap individu atau kelompok yang menyuarakan kritiknya terhadap kinerja atau kebijakan pemerintah. Dalam kerangka *labelling theory* yang dikemukakan oleh Howard S.Becker, hal tersebut menunjukkan bahwa deviasi dalam hal ini terletak di penyampaian kritik yang tidak hanya berasal dari sifat atau tindakan individu, tetapi juga hasil proses sosial di mana aktor dominan yang dalam hal ini yaitu kelompok pro-pemerintah atau biasa disebut dengan 02 *voters* yang memberi label kepada pihak-pihak yang dianggap menyimpang dari narasi dominan. Melalui pelabelan ini, kritik tidak lagi dipandang sebagai partisipasi demokratis yang sah, tetapi justru dikategorikan sebagai ekspresi partisan yang irasional dan provokatif.

Menurut konsep pelabelan politik yang dikemukakan oleh Rosalind Eyben, proses pelabelan melibatkan hubungan kekuasaan yang kompleks. Aktor-aktor dengan posisi kuasa dalam birokrasi negara, lembaga pembangunan, maupun ruang digital memiliki kapasitas untuk membentuk persepsi dan kategori isu melalui bingkai dan label tertentu. Dalam konteks ini, pelabelan "anak abah" menjadi bagian dari strategi kontrol wacana oleh kelompok dominan untuk mendefinisikan batas-batas diskursus yang sah dan tidak sah dalam arena politik digital. Pelabelan ini berfungsi sebagai mekanisme eksklusi simbolik, di mana individu yang dikategorikan sebagai "anak abah" secara otomatis diasingkan dari ruang legitimasi politik. Argumen mereka lebih mudah diabaikan, direduksi menjadi narasi partisan, dan dikaitkan dengan agenda politik elektoral lalu. Hal ini menciptakan efek kontrol sosial yang kuat, di mana warganet yang ingin menyampaikan kritik cenderung ragu atau bahkan enggan bersuara karena takut dicap sebagai "anak abah". Sebaliknya, pelabelan ini

juga dapat memicu reaksi balik yang positif. Beberapa kelompok yang dikaitkan dengan label "anak abah" justru membangun solidaritas kolektif atas dasar stigma tersebut. Mereka memanfaatkan label sebagai alat mobilisasi politik, seperti dalam kasus dukungan terhadap pasangan calon gubernur DKI Jakarta nomor urut 03 pada Pilkada 2024. Hal ini menunjukkan bahwa pelabelan bukanlah satu arah, tetapi bisa menjadi instrumen resistensi bagi kelompok yang termarginalisasi.

Perspektif teori identitas sosial Henri Tajfel dan John Turner, mengemukakan bahwa pelabelan "anak abah" memperjelas proses kategorisasi sosial, identifikasi, dan perbandingan sosial dalam ranah politik digital. Individu yang dikaitkan dengan label "anak abah" ini kemudian dibedakan dari kelompok "kami" (kontra-pemerintah/oposisi) dan ditempatkan dalam kategori "mereka" (pro-pemerintah/koalisi). Dalam hal ini, diperjelas dengan konsep inklusi dan eksklusi Eyben bahwa proses ini tidak hanya bersifat psikologis, tetapi juga struktural. Kelompok yang dilabeli "anak abah" mengalami eksklusi dari ruang legitimasi politik, di mana suara mereka sering kali didiskreditkan dan akses terhadap representasi politik dibatasi. Sebaliknya, kelompok pro-pemerintah mendapat struktur inklusi melalui pengakuan, amplifikasi media, dan legitimasi dari narasi dominan. Hal ini menunjukkan bahwa media sosial, meskipun memberikan ruang yang desentralistik, tetap menjadi medan pertarungan kekuasaan yang dipengaruhi oleh relasi kuasa dan struktur informasi yang tidak seimbang. Dalam konteks ini, pelabelan tidak hanya menjadi cerminan identitas, tetapi juga instrumen reproduksi ketimpangan dalam partisipasi politik digital.